

# PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH TIM PENGGERAK PKK DI DESA MARGAJAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS

Wildini Andinika<sup>1</sup>, R.Didi Djadjuli<sup>2</sup>, Wawan Risnawan<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia <sup>1,2,3</sup>

E-mail : wildiniandinika25@gmail.com

## ABSTRAK

*Hasil observasi menunjukkan kinerja tim penggerak PKK dalam pemberdayaan perempuan di Desa Margajaya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja tim penggerak PKK. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menggambarkan peristiwa berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Penggerak PKK Desa Margajaya telah berupaya melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan tata boga, menjahit, kebun hidroponik, praktik memandikan jenazah, program tahfidz Al-Qur'an, dan program Gergaji. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kualifikasi dan keahlian SDM yang belum optimal, keterbatasan tenaga ahli dan anggaran, serta kurangnya pengalaman anggota baru. Efisiensi pelaksanaan juga terganggu oleh data yang tidak akurat, komunikasi yang kurang efektif, dan tidak adanya sistem indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan program. Jumlah pelatihan dan kegiatan yang berhasil dilaksanakan terbatas karena kesulitan menemukan narasumber berkualitas dan keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Tim Penggerak PKK menganggarkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkala, menyusun rencana pengembangan individu, memperluas partisipasi dalam kegiatan eksternal, dan bekerja sama dengan institusi pendidikan.*

**Kata Kunci :** *Tim Penggerak PKK, Pemberdayaan Perempuan, Desa Margajaya.*

## PENDAHULUAN

Saat ini, PKK dituntut dapat menumbuhkan kemandirian baik itu secara pribadi, dalam lingkup keluarga, bahkan yang lebih luas dalam masyarakat setempat secara umum. Tim Penggerak PKK perlu beradaptasi dengan paradigma baru agar kreativitas anggotanya berkembang tidak terabradi oleh perkembangan zaman.

Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK harus tanggap terhadap perubahan, menjadi landasan bagi masa depan Gerakan PKK, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Mobilisasi seluruh potensi masyarakat, termasuk perempuan di pedesaan, diperlukan untuk suksesnya pembangunan (Agustina, R., Marliani, L., & Risnawan, W, 2023). Partisipasi

aktif anggota PKK dalam

10 Program Pokok PKK sangat diharapkan. Tim Penggerak PKK dibantu oleh kelompok wilayah atau kegiatan serta Dasawisma. Partisipasi ini diharapkan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan keluarga, serta menjaga kerukunan antar tetangga. Penting bagi anggota PKK untuk memahami, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari kegiatan PKK sehingga dapat menyebarkan hasilnya ke masyarakat luas dimana hal tersebut menunjukkan kinerja PKK. Hasibuan (2012:16) menyatakan bahwa kinerja adalah, "Suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu".

Pasal 27 UUD 1945 menegaskan hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Namun, dalam kenyataannya, peran perempuan di pemerintahan desa masih termarginalkan, sehingga meskipun jumlahnya lebih banyak, kualitas peran mereka masih lebih rendah. Kemudian sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah telah mengatur program kesetaraan dan keadilan gender yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini bertujuan menjadikan gender sebagai arus utama dalam pembangunan untuk mencapai

kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan PUG ditugaskan kepada seluruh Departemen, Lembaga Pemerintah, dan non-Departemen di semua tingkat, yaitu Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Mereka harus menyusun program yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Tugas pokok Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa sangat luas dan beragam. Mereka bertanggung jawab dalam berbagai aspek yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Mulai dari memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan keluarga, termasuk gizi, pola hidup sehat, hingga pedoman tentang pendidikan anak. Selain itu, mereka juga fokus pada pemberdayaan perempuan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun keagamaan, melalui pelatihan keterampilan dan dukungan pada usaha mikro. Tim ini juga aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, seperti kebersihan lingkungan dan kegiatan sosial. Di samping itu, mereka memberikan bimbingan untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui pembinaan keterampilan dan peluang usaha. Tidak hanya itu, perlindungan anak dan keluarga dari segala bentuk ancaman juga menjadi fokus, serta pemantapan nilai budaya dan tradisi lokal yang memperkuat identitas keluarga dan

masyarakat. Melalui koordinasi dan implementasi program-program ini, Tim Penggerak PKK di tingkat desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Di tingkat desa, masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Salah satu faktor utama adalah kebijakan pemerintah yang cenderung memberikan kuota terbatas bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan. Kebijakan ini sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan desa. Adapun menurut Najati (2005:54) terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan.
2. Prinsip Partisipasi.
3. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian.
4. Prinsip Berkelanjutan

Selain kebijakan pemerintah, faktor budaya dan tradisi yang dianut oleh warga desa juga memainkan peran penting dalam menentukan dinamika masyarakat desa. Budaya dan tradisi ini sering kali membatasi peran perempuan dalam masyarakat, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih sedikit untuk berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan. Pemahaman budaya yang keliru, di mana peran perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki, turut memperparah situasi ini. Ditambah

lagi, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung serta tingkat pendidikan yang rendah di kalangan warga desa berdampak pada kebijakan pemerintah desa.

Dalam konteks lokal, khususnya di Desa Margajaya, Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih sangat minim. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tradisi adat dan interpretasi nilai-nilai budaya masyarakat yang cenderung patriarkis (menekankan peran laki-laki). Akibatnya, perempuan sering kali kurang dilibatkan dalam proses pembangunan. Mereka umumnya hanya berperan dalam urusan rumah tangga, sementara isu-isu sosial kemasyarakatan dianggap sebagai tanggung jawab kaum pria.

Selain itu, faktor kebijakan pemerintah yang hanya memberikan proporsi kecil untuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan juga berkontribusi pada situasi ini. Bahkan di Desa Margajaya berdasarkan hasil dari pengamatan di lapangan ditemukan bahwa:

1. Belum terealisasinya program-program telah direncanakan seperti program rumah sehat dimana masih terdapat masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pengelolaan limbah dan sanitasi.
2. Kurangnya pemahaman kader PKK mengenai program PKK itu sendiri. Terlihat dari kader PPK belum mampu mensosialisasikan / memberi pemahaman

kepada perempuan terkait pola asuh anak dalam lingkungan keluarga sehingga program kerja yang telah dilaksanakan kurang berdampak pada masyarakat.

3. Beberapa anggota PKK di Desa Margajaya masih kurang memahami pentingnya dan manfaat dari program-program PKK, sehingga partisipasi mereka dalam kegiatan PKK tidak optimal. Selain itu, kesibukan urusan pribadi anggota juga menjadi faktor yang menghambat.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja tim penggerak PKK dalam pemberdayaan perempuan di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian (Mulyana, 2008:151). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak, Bendahara PKK, Sekretaris PKK, BPD Desa, Sekretaris Desa, dan 3 orang Masyarakat. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Mahsun (2022:72) menjelaskan bahwa: “Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah masukan. Sedangkan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya dan waktu yang telah ditentukan untuk itu”. Hasil penelitian mengenai proses dalam Kinerja Tim Penggerak PKK dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Margajaya menunjukkan bahwa:

### **1. Kecepatan dan Ketetapan Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan hasil wawancara untuk indikator kecepatan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal, hal ini ditandai dengan pelaksanaan program PKK yang selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, respons cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, dan penyesuaian program yang tepat waktu. Selain itu, kegiatan dilakukan dengan efisiensi tinggi, diiringi dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi yang rapi, serta adanya umpan balik yang efektif untuk perbaikan dan

penyesuaian program.

Berdasarkan hasil observasi untuk kecepatan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan telah optimal dilakukan sebagaimana yang saya lihat dalam RPJM dan RKP Desa Margajaya. Integrasi kegiatan-kegiatan PKK ke dalam dokumen perencanaan desa membantu memastikan adanya alokasi anggaran yang tepat, jadwal pelaksanaan yang jelas, serta koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian untuk indikator kecepatan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sebagaimana terlihat dari pelaksanaan program PKK yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, respons cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, serta integrasi yang baik antara kegiatan PKK dengan dokumen perencanaan desa seperti RPJM dan RKP. Hal ini juga tercermin dari alokasi anggaran yang tepat, administrasi yang rapi, dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat.

Hasil penelitian mengenai indikator kecepatan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pada Tim Penggerak PKK di Desa Margajaya telah optimal karena pelaksanaan program selalu dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, adanya respons cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, serta integrasi yang baik antara kegiatan PKK dengan dokumen perencanaan

desa seperti RPJM dan RKP. Ini memastikan alokasi anggaran yang tepat, administrasi yang rapi, dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak, serta kemampuan untuk menyesuaikan dan memperbaiki program secara tepat waktu.

Hasil penelitian mengenai dimensi proses (*process*) dalam indikator kecepatan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pada Tim Penggerak PKK di Desa Margajaya telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahsun (2012:97) bahwa: “Indikator proses kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan”.

## **2. Efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai efisiensi pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK di Desa Margajaya belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terlihat dari masih ditemukannya ketidakakuratan data mengenai dampak dan manfaat program yang telah dilaksanakan serta komunikasi yang belum efektif antar anggota pengurus PKK dan dengan pihak eksternal. Meskipun setiap kegiatan rutin dilakukan evaluasi berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan namun pada pelaksanaannya terkadang tidak sesuai harapan.

Dari hasil observasi untuk indikator efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi belum optimal

sebagaimana yang saya lihat bahwa belum adanya kejelasan indikator dalam pengukuran keberhasilan suatu program. Karena memang setelah pelaksanaan kegiatan biasanya program dianggap selesai. Monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal sehingga.

Dengan demikian dari hasil penelitian diketahui bahwa indikator efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana terlihat belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, tidak adanya kejelasan dalam indikator pengukuran keberhasilan program mengakibatkan sulitnya mengukur dampak nyata dari setiap kegiatan yang telah dilakukan.

Hambatan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tim penggerak PKK di Desa Margajaya mencakup kurangnya indikator sistem untuk mengukur efisiensi, keterampilan dan pengetahuan anggota dalam melakukan evaluasi, serta data yang tidak akurat dan terkini. Komunikasi yang tidak efektif antar anggota pengurus dan dengan pihak eksternal, pengumpulan data yang tidak konsisten, dan keterbatasan waktu anggota karena tanggung jawab pribadi juga menghambat evaluasi dan pengukuran efisiensi program. Semua hambatan ini menyulitkan pengurus dalam memantau kemajuan dan hasil dari program pemberdayaan perempuan yang dijalankan.

Upaya yang dilakukan oleh Tim

Penggerak PKK Desa adalah dengan merancang langkah- langkah strategis yang mencakup membangun sistem indikator yang jelas dan terukur untuk mengukur efisiensi kegiatan, pelatihan rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam evaluasi kegiatan, pembaruan sistem pengumpulan data untuk memastikan data selalu akurat, peningkatan komunikasi antar anggota tim dan dengan pihak eksternal, menetapkan prioritas evaluasi berdasarkan dampak dan pentingnya terhadap tujuan program, menjadwalkan evaluasi secara rutin, menyisihkan waktu khusus untuk kegiatan evaluasi, serta melakukan monitoring progres secara berkala. Upaya- upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PKK di Desa Margajaya.

Hasil menunjukkan bahwa apabila efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pada Tim Penggerak PKK di Desa Margajaya belum optimal akan berdampak pada kualitas program dimana kegiatan yang tidak efisien akan mengurangi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga tujuan yang diharapkan mungkin tidak tercapai secara maksimal. Kemudian penggunaan sumber daya tidak akan digunakan secara optimal baik finansial maupun tenaga. Hal ini bisa menyebabkan pemborosan dan kurangnya alokasi sumber daya untuk program-program yang lebih membutuhkan.

Hasil penelitian mengenai

indikator efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dalam dimensi proses (*process*) pada Tim Penggerak PKK di Desa Margajaya belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2015:21) bahwa: “Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan input serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian pada dimensi proses (*process*) terdapat indikator yang sudah optimal dan ada yang belum optimal. Indikator yang sudah optimal yakni kecepatan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan. Setiap kegiatan ini dimasukkan ke dalam RPJM dan RKP. Hal ini tentunya dapat meningkatkan efektivitas program. Pelaksanaan kegiatan yang cepat dan tepat waktu memastikan bahwa program-program PKK dapat berjalan sesuai rencana, mencapai sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Sedangkan indikator yang belum optimal adalah mengenai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Hal ini disebabkan adanya hambatan berupa kurangnya indikator sistem untuk mengukur efisiensi, keterampilan dan pengetahuan anggota dalam melakukan evaluasi, serta data yang tidak akurat dan terkini. Tentunya hal ini akan berdampak pada kualitas program dimana kegiatan yang tidak efisien akan mengurangi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga

tujuan yang diharapkan mungkin tidak tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui untuk dimensi proses (*process*) belum optimal hal ini terlihat dari indikator pada efisiensi pelaksanaan kegiatan yang masih belum optimal dimana masih ditemukan keterbatasan ketidakakuratan data mengenai dampak dan manfaat program yang telah dilaksanakan serta komunikasi yang belum efektif antar anggota pengurus PKK dan dengan pihak eksternal. Kondisi ini akan berdampak pada kualitas program dimana kegiatan yang tidak efisien akan mengurangi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga tujuan yang diharapkan mungkin tidak tercapai secara maksimal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah (2014:56) bahwa: “*Quality of work* menunjukkan sejauh mana mutu seorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian”.

Dan sebagaimana yang kita ketahui efisiensi sebagaimana dijelaskan oleh Supriyono (1997:35) bahwa:

Efisiensi adalah jika suatu unit dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Efisiensi merupakan kemampuan Organisasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (*input*) yang serendah-rendahnya untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*),

dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui sangat pentingnya peningkatan efisiensi dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan. Langkah yang perlu dilakukan adalah memastikan data yang akurat mengenai dampak dan manfaat program yang telah dilaksanakan, sehingga evaluasi dapat dilakukan dengan tepat dan objektif. Selain itu, meningkatkan komunikasi yang efektif antar anggota pengurus PKK serta dengan pihak eksternal sangatlah penting. Komunikasi yang baik akan membantu dalam koordinasi dan penyelarasan tujuan, serta memudahkan dalam penyampaian informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program.

Dengan mengoptimalkan efisiensi proses, PKK Desa Margajaya dapat meningkatkan kualitas program yang dilaksanakan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Ini mencakup pengelolaan sumber daya yang lebih baik, penggunaan input secara efektif, dan penyelesaian pekerjaan dengan benar. Dalam jangka panjang, upaya ini akan meningkatkan kualitas kerja dan keberhasilan program-program yang dijalankan oleh PKK Desa Margajaya, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik.

## **KESIMPULAN**

Proses pemberdayaan perempuan oleh Tim Penggerak PKK di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis menunjukkan hasil yang beragam dalam dua indikator utama: kecepatan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Pada aspek kecepatan dan ketetapan, pelaksanaan kegiatan PKK berjalan optimal dengan program yang selalu sesuai jadwal, respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, dan integrasi yang baik dengan dokumen perencanaan desa seperti RPJM dan RKP. Hal ini mencerminkan adanya efektivitas dan koordinasi yang baik, yang mendukung pencapaian sasaran program secara maksimal. Namun, pada indikator efisiensi, masih terdapat kendala yang signifikan, seperti kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif, data yang tidak akurat, serta komunikasi yang belum efektif antara anggota pengurus dan dengan pihak eksternal. Hambatan ini berdampak pada kualitas program, di mana kegiatan yang tidak efisien dapat mengurangi efektivitas pencapaian tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan efisiensi perlu difokuskan pada perbaikan sistem evaluasi, penyempurnaan pengelolaan data, serta peningkatan keterampilan anggota dalam melakukan evaluasi dan komunikasi. Dengan demikian, Tim Penggerak PKK di Desa Margajaya dapat mencapai hasil yang lebih

optimal dalam pemberdayaan perempuan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, R., Marliani, L., & Risnawan, W. (2023). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Bintang Manggala” Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (Bpp) Di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2012. Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke. Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional
- Mulyana, Deddy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
- Najiati, S. 2005. Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International.
- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang Hak Warga Negara Mendapatkan Pekerjaan.
- Wardhana, Aditya. 2022. Manajemen Kinerja (Konsep, Teori dan Penerapannya). Bandung: CV. Media Sains Indonesia.